

# POLITIK LINGKUNGAN: STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN

Aidil Aulya Fasdani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract:** The problem of urban trash is crucial problem and become image. tata manage city as well as case of waste management in Pekanbaru City Year 2016, the problem until it has tarnished the good name of Pekanbaru City until the national level and shows the government ability in waste management. The purpose of this research is to know urban waste management strategy by Pekanbaru city government and to analyze factors influencing waste management by government of Pekanbaru city. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques that writers do is interview, observation and documentation whereas, data analysis is done by data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that: First, waste management by Pekanbaru Municipal Government through privatization of garbage transportation becomes the culprit of garbage pile. The privatization of garbage transportation also further hampers the awareness of government agencies, especially the Sub-districts and districts to monitor and evaluate their respective areas, the community is reluctant to participate in the management of garbage, which in the end will dispose of garbage carelessly. Secondly, the factors influencing the waste management strategy by Pekanbaru Municipal Government which the writer considers the most dominant is the lack of budgetary resources to modernize the waste management pattern especially by presenting TPS 3R on human settlements and capacity building of waste management machine at Muara Fajar Final Disposal Site.

**Abstrak:** Permasalahan sampah perkotaan adalah masalah krusial dan menjadi *image*. tata kelola kota demikian halnya dengan kasus pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016, masalah sampah telah mencoreng nama baik Kota Pekanbaru sampai ketinggian Nasional dan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan sampah perkotaan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang Penulis lakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan, Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui swastanisasi pengangkutan sampah justru menjadi biang timbulnya timbunan sampah. Swastanisasi pengangkutan sampah juga semakin memperendah kesadaran instansi Pemerintah khususnya Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi diwilayahnya masing-masing, masyarakat enggan berpartisipasi dalam pengelolan sampah yang pada akhirnya membuang sampah sembarangan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang penulis anggap paling dominan adalah minimnya sumber daya anggaran guna memodernisasi pola pengelolaan sampah khususnya dengan menghadirkan TPS 3R pada pemukiman penduduk dan peningkatan kapasitas mesin pengelolaan sampah pada TPA Muara Fajar.

**Kata Kunci:** politik lingkungan, strategi pengelolaan, sampah

## PENDAHULUAN

Hal yang mendasar dalam pengelolaan sampah ini adalah sangat kompleks dan bersifat dinamis. Disebut kompleks karena melibatkan banyak pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, masyarakat, industri, pedagang dan LSM. Dinamis karena volume timbunan sampah akan berubah seiring dengan perubahan waktu. Kenyataan ini menyebabkan penanganan sampah

tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan teknis (mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan di TPA) tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber utama penghasil sampah.

Kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan sudah tidak cukup lagi sebagai rujukan pengaturan persampahan. Perda tersebut lebih berorientasi pada penanganan kebersihan lingkungan saja dan penekanan kewajiban masyarakat membayar retribusi dan konsep penanganan sampah hanya ditekankan pada pengumpulan sampah, pengangkutan dan Penimbunan di TPA. Hal ini juga sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kedua perundang-undangan tersebut membawakan perubahan-perubahan sangat mendasar dalam pengelolaan sampah, baik menyangkut keseluruhan cara berpikir (*mindset*), orientasi dan spirit serta konsepsi kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, pengelolaan sampah kemudian menghasilkan banyak agenda perubahan kebijakan dalam pengelolaan sampah, yang tentunya harus diacu oleh setiap daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah didaerahnya masing-masing.

Perubahan yang paling utama adalah perubahan paradigma kebijakan pengelolaan sampah, yang merujuk pada paradigma transformasi. Diantaranya adalah menyangkut ideologi kebijakan, orientasi dan spirit kebijakan serta basis konsep kebijakan pengelolaan sampah. Spirit dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 mengisyaratkan Pengelolaan sampah tidak lagi menghendaki adanya eksklusifitas kebijakan pengelolaan sampah oleh satu pihak tertentu saja. Masyarakat luas dan dunia usaha diposisikan juga mempunyai kedaulatan yang sama pentingnya dengan pemerintah, sehingga harus ikut berperan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

Efektifitas pengelolaan sampah hanya dapat dicapai melalui 3 (tiga) pilar, yaitu pemerintah, masyarakat luas dan dunia usaha yang bekerja secara integral (terpadu), komprehensif (menyeluruh) dan mutualistik (saling menguntungkan). Secara implisit konsep ini mengusung asas

kegotong-royongan dalam pengolahan sampah sebagai salah satu modal sosial yang strategis. Hal ini berbeda dibandingkan pengelolaan yang selama ini lebih didominasi oleh pihak pemerintah saja. Regulasi persampahan juga menekankan orientasi pada tujuan, yaitu melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya pencemaran dan bencana sampah sebagaimana diamanatkan juga dalam UUD 1945 pasal 28 H yakni setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan pengelolaan sampah sebelumnya yang berorientasi pada masalah yaitu menangani sampah dalam rangka mengatasi masalah kebersihan lingkungan (utamanya lingkungan kota). Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga memiliki spirit penyelamatan masyarakat (secara luas) dan lingkungan hidup tidak sekedar hanya kebersihan lingkungan saja.

Berdasarkan perubahan paradigma kebijakan pengelolaan sampah yang diamanatkan pada UUPS kemudian mengusung banyak agenda perubahan penting dalam kebijakan pengelolaan sampah, diantaranya menyangkut pemaknaan baru terhadap sampah dan kategorisasi sampah yang dikelola. Kota Pekanbaru sebagai daerah otonom telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan daerah tersebut pengelolaan sampah disamping itu juga ditetapkan tema-tema Pengelolaan sampah sejak dari aspek teknis (pendekatan komprehensif dari sumber serta konsep 3R (*reduce, reuse dan recycle*) hingga aspek penempatan posisi dan peran serta hubungan antara negara/pemerintah dan masyarakat yang kuat menuju *self government society, good governance, law enforcement* dalam rangka pengendalian lingkungan hidup khususnya Pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah merupakan aspek penting dalam mengurangi jumlah sampah yang ada di suatu Kota/ Kabupaten termasuk dalam konteks ini masalah sampah di Kota Pekanbaru. Timbunan rata-rata sampah masyarakat perkotaan menurut pedoman penyusunan sanitasi lingkungan kementerian pekerjaan umum 2,5m<sup>3</sup>/hari. Permasalahan sampah perkotaan adalah

masalah krusial dan menjadi *image* tata kelola kota. Demikian halnya dengan kasus pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tahun 2016, masalah sampah telah mencoreng nama baik Kota Pekanbaru sampai ke tingkat nasional dan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk yang paling sederhana untuk menilai keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik.

Dalam konteks tata kelola sampah serta dalam upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan sebagai isu global, terlihat bahwa strategi pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum mumpuni untuk mewujudkan perbaikan tata kelola sampah guna mewujudkan keberlangsungan lingkungan sebagai isu politik global. Paling tidak dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melibatkan pihak ketiga nyatanya gagal. Justru pengelolaan sampah yang dimonopoli sendiri oleh Pemerintah dirasakan lebih efektif. Pengelolaan sampah yang masih tradisional (*open dumping*) dan belum mengarah pada modernisasi tata kelola sampah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum mempunyai gagasan yang cukup ideal untuk mengelola sampah sebagai isu global itu.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ruang lingkup penelitian yang akan peneliti gunakan untuk mencari data yang terkait dengan penelitian, antara lain Badan Lingkungan Hidup serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pertambahan jumlah penduduk suatu kota, cepat atau lambat, suka tidak suka, akan menimbulkan aspek dan dampak yang sangat signifikan. Masalah sampah dan kota bagaikan dua mata sisi keping uang yang saling berpengaruh

positif dan bahkan pengaruh negatif, tergantung dari manajemen dan tingkat kepedulian warga masyarakat kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah terdiri dari: (a). sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, (b). sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. (c). sampah spesifik, yaitu yang berasal dari kegiatan industry, atau kegiatan perhotelan, atau kegiatan yang diduga menimbulkan limbah berbahaya dan beracun (B3).

### Pengaturan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Maka guna mewujudkan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pengertian di atas, Pemerintah Kota Pekanbaru sejatinya telah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugasi untuk mengurus sampah perkotaan.

Sebagai *leading sector* pengelolaan sampah khususnya pada tahun 2016, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah secara umum di Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk sampah yang dihasilkan dari aktifitas pasar maka Dinas Pasar turut bertanggungjawab mengelola sampah yang dihasilkan dari aktifitas pasar tersebut terutama pada pasar tradisional. Secara spesifik pengelolaan berbagai jenis sampah perkotaan di Kota Pekanbaru antara lain:

- Pengelolaan sampah pasar
- Pengelolaan sampah rumah tangga dan sarana umum
- Pengelolaan Sampah Pertokoan dan Perkantoran
- Pengelolaan sampah jalan dan sarana umum
- Pengelolaan sampah rumah sakit

## Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Sampah

Aspek ini meliputi beberapa kegiatan yaitu perencanaan strategis, kerangka peraturan dan kebijakan, partisipasi masyarakat, manajemen keuangan, pengembangan kapasitas institusi, serta penelitian dan pengembangan (termasuk di dalamnya pemeriksaan dan tindakan perbaikan). Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.

Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah “meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam paradigma baru pengelolaan sampah”. Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk mengubah cara pandang “sampah dari bencana menjadi berkah”. Hal ini penting karena pada hakikatnya pada timbunan sampah itu kadang-kadang masih mengandung komponen-komponen yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi tinggi namun karena tercampur secara acak maka nilai ekonominya hilang dan bahkan sebaliknya malah menimbulkan bencana yang dapat membahayakan lingkungan hidup. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan pemerintah serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah.

Sistem pengelolaan persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem pengelolaan yang berbasis pada masyarakat yang dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Para pemulung dapat ditingkatkan harkat dan martabatnya menjadi mitra tetap pada industri kecil pengolah bahan sampah menjadi bahan

baku. Dana untuk membayar imbalan dari para pegawai/petugas yang terlibat dalam kebersihan kota dapat diperoleh dari iuran warga (retribusi tetap dilakukan) ditambah dari hasil keuntungan dari pemrosesan bahan sampah.

Pemain dan partner dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengguna jasa (rumah tangga, pasar, industri, organisasi), penyedia layanan kebersihan (RT/RW, pemerintah, perusahaan swasta), pendaur ulang (pemulung, pemilik lapak dan pabrik pengguna bahan daur ulang), dan produsen dan pengguna pupuk kompos, membuat masalah sampah bukan hanya menjadi urusan Dinas Kebersihan atau instansi lainnya di daerah, tapi menjadi urusan dan kepentingan semua pihak.

## Perumusan Strategi Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Pengelolaan Sampah, jelas mengamanatkan kepada pemerintah beserta pihak-pihak terkait lainnya untuk proaktif dan lebih responsif terhadap permasalahan pengelolaan sampah dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dan partisipatif bagi masyarakat. Akan tetapi realitas yang terjadi saat ini menunjukkan kontradiksi antara tindakan yang dilakukan pemerintah dengan semangat yang terkandung dalam UU tersebut, ini terindikasi dari rendahnya kesadaran aparat pemerintah beserta *stakeholder* lainnya terhadap perannya dalam penanganan persampahan sebagai upaya mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan berwawasan lingkungan, inefektifitas instrumen hukum dalam mengarahkan pola perilaku masyarakat untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan sampah, serta menurunnya kualitas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ditandai dengan berubahnya sistem pengelolaan TPA dari *sanitary landfill* menjadi *open dumping*.

Pemerintah beserta *stakeholder* lainnya dalam hal ini diharapkan mampu mensinergikan dan mengoptimalkan kembali kebijakan dan strategi pengelolaan sampah agar menjadi stimulus bagi masyarakat dalam mengembangkan pola perilaku yang berwawasan lingkungan, dalam artian setiap tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat senantiasa

didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan kadar kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat dalam menangani sampah terletak secara eksplisit pada pengaplikasian paradigma yang tidak lagi akomodatif dan responsif terkait penanganan sampah serta pelaksanaan (*enforcement*) yang belum maksimal terhadap regulasi-regulasi mengenai penanganan sampah. Dalam hal ini perlu adanya sebuah komitmen yang kuat dan terobosan yang bersifat kreatif-inovatif dari semua pihak untuk mengoptimalkan perangkat regulasi mengenai penanganan dan pembangunan sampah yang berwawasan lingkungan serta merubah paradigma yang sudah tidak mempunyai relevansi dalam konteks membangun kesadaran pemerintah, *stakeholder* terkait, dan masyarakat dalam menghadapi problematika sampah.

### **Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Sampah**

Pola pengelolaan sampah yang dilaksanakan saat ini belum tercapai pola pengelolaan terpadu dari masyarakat sebagai penghasil sampah dan pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sarana persampahan. Dari sisi masyarakat masih terbentuk persepsi bahwa sampah adalah bahan yang sudah tidak terpakai dan telah menjadi kewajiban pihak pemerintah untuk mengelolanya dan membersihkannya. Pola pendekatan baru dalam pengelolaan sampah saat ini telah di konsepsikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP). Kebijakan Nasional tersebut merupakan reaksi atas pengelolaan sampah di waktu sebelumnya yang dilaksanakan secara konvensional dan terkesan adanya sekat pemisah antara masyarakat sebagai produsen sampah dan peran pemerintah sebagai pengelola persampahan.

Dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Persampahan yang terkait dengan tema perilaku pengelolaan sampah disebutkan antara lain, kebijakan pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya dengan pola mening-

katkan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. Dalam hal partisipasi masyarakat kebijakan yang dituangkan adalah meningkatkan pemahaman sejak dini, menyebarluaskan pemahaman tentang sampah kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, meningkatkan pembinaan pengelolaan sampah khususnya kepada kaum perempuan

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan**

#### ***Sumber Daya Manusia***

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih menjadi faktor yang cukup dominan. Paling tidak hal itu dibuktikan dengan minimnya tenaga penyuluh pengolahan sampah masyarakat baik melalui bank sampah maupun melalui TPS3R. Hampir tidak ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh DKP dalam pengolahan sampah masyarakat sehingga sampah yang ada dibiarkan menumpuk lalu diangkut ke TPA oleh petugas maupun pihak lain yang menjadi mitra masyarakat dalam mengangkut sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pembinaan masyarakat belum berjalan serta perlu disadari bahwa masyarakat diminta berpartisipasi sementara pemerintah tidak menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti TPS3R maupun Bank Sampah, selain itu contoh yang paling sederhana adalah tidak adanya kebijakan pengadaan tong sampah dengan model pemilahan sampah pada area pemukiman maupun TPS/TPPS.

#### ***Sarana dan Prasarana***

Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan merupakan strategi yang paling utama dan terprogram dalam kegiatan kebersihan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan kecamatan, namun usulan dalam menambah sarana dan prasarana belum sepenuhnya dapat memaksimalkan daya angkut sampah yang menumpuk di TPS. Selama ini yang menjadi masalah yang paling besar dari pengendalian kebersihan di Kota Pekanbaru adalah masih tradisionalnya sistem pemilahan sampah pada TPS/TPPS. Se-

mentara itu untuk bank sampah mestinya sampah sudah dipilah dari TPS, oleh sebab itu program ini tampak kurang efektif. Sistem pemilahan sampah hanya dipusatkan pada beberapa area saja tidak merata diseluruh pemukiman masyarakat, bahkan ada pemukiman masyarakat yang tidak memiliki TPS sehingga sampah-sampah yang dihasilkan ditumpuk di depan rumah tanpa dipilah dan untuk selanjutnya diangkut ke TPA oleh petugas.

## SIMPULAN

Strategi pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai upaya mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan cenderung gagal dan lemah seperti swastanisasi pengangkutan sampah, program ini justru menjadi biang timbulnya timbunan sampah. Swastanisasi pengangkutan sampah juga semakin memperendah kesadaran instansi pemerintah khususnya Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. Swastanisasi pengangkutan sampah juga membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah yang pada akhirnya masyarakat membuang sampah pada TPS-TPS di pinggir jalan, trotoar maupun drainase dan sungai-sungai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang penulis anggap paling dominan adalah minimnya sumber daya anggaran guna memodernisasi pola pengelolaan sampah khususnya dengan menghadirkan TPS3R pada pemukiman penduduk dan peningkatan kapasitas mesin pengelolaan sampah pada TPA Muara Fajar. Selain itu tidak dapat dielakkan bahwa faktor sumber daya manusia turut mempengaruhi

pengelolaan sampah, hal ini paling tidak dapat dilihat dari kurangnya kegiatan penyuluhan tentang pemanfaatan sampah oleh *leading sector* instansi pengelola sampah (DKP).

## DAFTAR RUJUKAN

- Hadari, Nawawi. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herman Hidayat, 2005. *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hunger, J. David dan Thomas Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi
- Mangkuprawira, Sjafari. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Jakarta: Graha Indonesia
- Moh, Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, S. 1998. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Riant Nugroho, 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Saladin, Djaslim. 2003. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Bandung: Linda Karya
- Sugiono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabet.
- Suharsimi, Arikanto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hessel. Nogis. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Manajemen in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.